

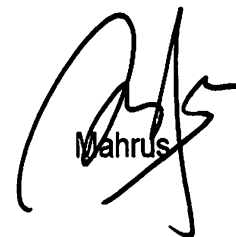
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 321/DJPT.6/RC.610/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan Triwulan I Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I Tahun 2026 beserta data dukungannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Mahrus

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

2026



LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN I

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan periode Triwulan I Tahun 2026 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja Yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terimakasih.

Jakarta, April 2026
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan



Mahrus

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG	8
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.3	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR TIM KERJA	10
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	
2.1	RENCANA STRATEGIS	15
2.2	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	16
2.3	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	16
2.4	PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KNMP TAHUN 2026.....	19
BAB 3	AKUNTABILITAS KERJA	
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	39
3.2.1	PENGELOLAAN KENELAYANAN YANG BERDAYA SAING	39
3.2.2	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN EKONOMI NELAYAN MELALUI FASILITAS PENGUATAN USAHA	49
3.2.2	TERWUJUDNYA LAYANAN DUKUNGAN MANAJERIAL YANG BAIK LINGKUP DIREKTORAT	49
	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	51
3.3	AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
BAB 4	PENUTUP	
4.1	KESIMPULAN	56
4.1.2	SARAN	57
4.2	TINDAK LANJUT	57

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 2	Rencana Kinerja Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026
TABEL 3	Rencana Aksi IKU Tahun 2026
TABEL 4	Tindak Lanjut Persiapan Pembangunan KNMP T.A. 2026 tanggal 5 Januari 2026
TABEL 5	Tindak Lanjut Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20-23 Januari 2026
TABEL 6	Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026
TABEL 7	Persentase Nelayan yang Terfasilitasi Pengembangan Usahanya
TABEL 8	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Nelayan yang Terfasilitasi Pengembangan Usahanya
TABEL 9	Nelayan yang Difasilitasi Kepemilikan Tanahnya Melalui Program Sertifikasi Tanah Nelayan
TABEL 10	Capaian Nelayan yang Difasilitasi Kepemilikan Tanahnya Melalui Program Sertifikasi Tanah Nelayan (orang)
TABEL 11	Kampung Nelayan yang Dikembangkan dan Difasilitasi Penataannya
TABEL 12	Persentase Nelayan yang Terlindungi
TABEL 13	Perbandingan Capaian Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat Kapasitasnya
TABEL 14	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya
TABEL 15	Tabel Capaian Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya
TABEL 16	Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang dikembangkan
TABEL 17	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 18	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan
TABEL 20	Perbandingan Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 21	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
TABEL 22	Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 Bagan Struktur Tim Kerja Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- GAMBAR 2 Dokumentasi Pembahasan kegiatan Evaluasi Progres Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan KNPM tanggal 6 Januari 2026
- GAMBAR 3 Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026
- GAMBAR 4 Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026
- GAMBAR 5 Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026
- GAMBAR 6 Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026
- GAMBAR 7 Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026
- GAMBAR 8 Dokumentasi Pertemuan dalam rangka Koordinasi usulan calon lokasi (KNMP) Tahun 2026 tanggal 27 Maret 2026
- GAMBAR 9 Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku
- GAMBAR 10 Dokumentasi Kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SHAT Nelayan Prov. Jawa Barat Tahun 2026
- GAMBAR 11 Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan I Tahun 2026
- GAMBAR 12 Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I Tahun 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, terbentuk berdasarkan Kepmen KP No.2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.**5.147.980.037.000,-** yang tertuang pada DIPA Tahun 2026 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2026 Tanggal 01 Desember 2025, Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026, mengalami penambahan Sasaran Kinerja menjadi 3 Sasaran Kerja serta didukung oleh 10 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2026	Triwulan I	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	1	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	7,18	7,18
		2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	2500	1033	41,32
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	250	-	-
		4	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	21	21
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	5	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	50	7,2	14,4
		6	Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)	10	-	-
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	84,5	-	-
		8	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88,2	-	-
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	86	100	100
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98,6	-	-

Tabel 1. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja hasil dari pengukuran diperoleh capaian sebesar **97,74 %** hasil dari pengukuran ini dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian kinerja. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja juga dilakukan periodik.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipinggirkan, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Presiden Republik Indonesia meluncurkan program strategis nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran ini menandai dimulainya gerakan nasional koperasi berbasis desa dan kelurahan, sebagai wujud nyata dari Asta Cita ke-6: membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Program ini didasarkan pada:

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih.
- b. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Kopdeskel Merah Putih.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitas kepada kelompok pembudidaya ikan, pengolah, pemasar ikan,

petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota koperasi desa/kelurahan merah putih. Serta mendorong koperasi sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi koperasi desa/Kelurahan Merah Putih. Pembentukan koperasi merah putih sektor kelautan dan perikanan merupakan penumbuhan koperasi baru, pengembangan koperasi aktif, serta Revitalisasi koperasi tidak aktif.

Tujuan utama Kopdeskel Merah Putih adalah membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang inklusif, memperpendek rantai distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan serta akses layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Kopdeskel Merah Putih bukan sekadar koperasi, melainkan gerakan nasional kemandirian ekonomi rakyat. Dengan pendekatan gotong royong, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan, koperasi ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2026 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan triwulan I tahun 2026 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR TIM KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayanan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayanan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayanan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan informasi kenelayanan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan,

- pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan data dan informasi kenelayanan, penyelenggaraan fasilitasi perlindungan nelayan, penyelenggaraan fasilitasi pembentukan, pengembangan, pembinaan kelembagaan, dan diversifikasi usaha nelayan, dan penyelenggaraan fasilitasi akses pembiayaan nelayan, serta penyelenggaraan fasilitasi pembangunan dan penataan kampung nelayan ; dan
 6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Adapun susunan Tim Kerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Subdirektorat Perlindungan Nelayan**
- b. **Subbagian Tata Usaha**
- c. **Tim Kerja Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan**
- d. **Tim Kerja Penyelenggaraan Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan dan Akses Pembiayaan Usaha Nelayan**
- e. **Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan**
- f. **Tim Kerja Fasilitasi Identifikasi, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan**
- g. **Tim Kerja Fasilitasi Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan**
- h. **Tim Kerja Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga dalam Pembangunan dan Penataan Kampung Nelayan**
- i. **Kelompok Jabatan Fungsional :**
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama

- Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Ahli Muda
- Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Ahli Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional PRAKOM Ahli Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil
- Kelompok Jabatan Fungsional Analis SDMA Ahli Pertama



Gambar 1. Bagan Struktur Tim Kerja Dit. PPN

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan triwulanan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya

dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2029

Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari Upaya mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045** yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, Pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengurangan ketimpangan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama Pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi struktural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi. (2) Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan Tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2026. (3) Pengembangan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Perindungan dan Pemberdayaan Nelayan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan Sektor kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis Kepentingan Nasional”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

1.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2024 – 2029, berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026.

1.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja.

Tabel 2. Rencana Kinerja Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026
1	Pengelolaan Kenelayanan Yang Berdaya Saing	1	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100
		2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	2500
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	250
		4	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Yang Berdaya Saing	6	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	50
		7	Jumlah Kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)	10
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	84,5
		8	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88,2
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	86
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98,6

Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel 2 berikut ini. Rencana Kinerja Dit. Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Persentase Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	1 Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		2 Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		3 Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
		4 Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		5 Supervisi dan Evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		6 Identifikasi dan Verifikasi Lokasi Penataan Kampung Nelayan
		7 Pelaksanaan Penataan Kampung Nelayan
		8 Supervisi dan Evaluasi Penataan Kampung Nelayan
		9 Identifikasi
		10 Penyusunan/revisi dan sosialisasi pedoman fasilitasi perlindungan nelayan
		11 Fasilitasi perlindungan awak kapal perikanan pelintas batas
		12 Identifikasi Identitas Nelayan Dalam Rangka Perlindungannya
		13 Koordinasi dan Pelaporan Hasil Identifikasi Identitas Nelayan Dalam Rangka Perlindungannya
		14 Laporan Data Nelayan yang Teridentifikasi Identitasnya Dalam Rangka Perlindungan dan Pemberdayaan

2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Berdaya Saing	1 Reviu dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Kelembagaan Usaha Nelayan 2 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan 3 Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan (KUB dan Koperasi) 4 Pendampingan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KUB dalam rangka Pembangunan Korporasi Nelayan 5 Penyusunan/Reviu dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Banguan 6 Sarana Pengembangan Usaha Nelayan dalam rangka Pembentukan Korporasi Nelayan
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	1 Tingkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan , Memberikan kesempatan kepada 2 pegawai lingkup Dit. PPN untuk mengikuti program tugas ataupun ijin belajar. 3 Memanfaatkan media social dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dit. PPN 4 Berpartisipasi Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Melaksanakan tindak lanjut dari setiap 5 hasil temuan pengawasan 6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan 7 Mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran

1.4 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN 2026

1. Perkembangan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di awal Tahun 2026 dimulai dengan tahap Identifikasi di lapangan untuk memastikan Lahan Clear and Clean serta aspek sosial ekonomi dari calon lokasi KNMP.
2. Saat ini di awal bulan April mulai dilakukan Survey Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di beberapa titik lokasi mulai dari beberapa wilayah antara lain :
 - 1.) Sumatra meliputi : Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung.
 - 2.) Sulawesi meliputi : Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara.
 - 3.) Kalimantan meliputi : Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan.
 - 4.) Jawa meliputi : Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur.
 - 5.) Bali dan Nusa Tenggara meliputi : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
 - 6.) Maluku dan Maluku Utara meliputi : Maluku, Maluku Utara
3. Berikut pembahasan dan arahan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada rapat persiapan Pembangunan KNMP T.A. 2026 tanggal 5 Januari 2026 sebagai berikut :
 - Pembahasan progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada Pembangunan sentra kuliner pada lokasi KNMP agar dirancang strategis, memiliki visibilitas baik dari arah laut maupun darat (permisalan di KNMP Raja Ampat).
 - Shelter di beberapa lokasi dapat difungsikan sementara sebagai Balai Nelayan, dengan penambahan papan nama yang jelas.
 - Balai Nelayan diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat nelayan,

bersifat multifungsi (pelatihan, pertemuan, dialog), serta mengacu pada konsep Balai Nelayan di Biak dan Cikeusik, Pandeglang.

- Penataan ulang docking kapal dimungkinkan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional.
- Paparan kepada Menteri KP agar disiapkan secara komprehensif, termasuk video dokumentasi seluruh lokasi KNMP meskipun tidak seluruhnya ditampilkan.
- Diperlukan penetapan lokasi utama dan alternatif KNMP yang akan dikunjungi Presiden RI, dengan pertimbangan aksesibilitas, kesiapan infrastruktur, dan dukungan pemerintah daerah.

Tabel 4. Tindak Lanjut Persiapan Pembangunan KNMP T.A. 2026 tanggal 5 Januari 2026

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu
1	Menetapkan lokasi utama dan alternatif KNMP untuk kunjungan Presiden RI	Tim Koordinasi KNMP	Segera
2	Menyempurnakan desain dan fungsi Balai Nelayan sesuai arahan rapat	Tim Teknis KNMP & Konsultan	Januari 2026
3	Menyiapkan paparan dan video progres pembangunan seluruh lokasi KNMP	Sekretariat Tim KNMP	Sebelum paparan ke MKP
4	Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dukungan infrastruktur dan lingkungan	Tim Koordinasi & Pemda	Berjalan
5	Monitoring percepatan progres fisik lokasi prioritas	Tim Teknis KNMP	Berkala

4. Pembahasan kegiatan Evaluasi Progres Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan KNPM tanggal 6 Januari 2026.

Pokok-Pokok Pembahasan :

a) Evaluasi Progres Pembangunan KNMP

- Pimpinan rapat menekankan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh pekerjaan fisik dan nonfisik pada lokasi Kampung Nelayan Merah Putih sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Disampaikan bahwa masih terdapat beberapa lokasi yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait penyelesaian pekerjaan, kelengkapan administrasi kontrak, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan.

b) Administrasi Keuangan dan Kontrak

- Ditekankan agar seluruh proses administrasi keuangan, termasuk pengajuan pembayaran dan pemberian kesempatan/perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, segera dituntaskan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Seluruh penyedia diwajibkan menyampaikan dokumen administrasi secara lengkap dan tepat waktu untuk menghindari kendala dalam proses pembayaran.

c) Koordinasi dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas

- Pimpinan rapat meminta agar PPK dan tim teknis meningkatkan koordinasi dengan seluruh penyedia dan konsultan pengawas, khususnya dalam pemantauan progres harian dan penyelesaian permasalahan lapangan.
- Setiap kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan agar segera dilaporkan dan dicarikan solusi secara bersama.

Kesimpulan Rapat :

- a) Seluruh unit kerja terkait diminta untuk memastikan percepatan penyelesaian pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sesuai target.
- b) Administrasi keuangan dan kontrak harus segera dirampungkan guna menjamin kelancaran proses pembayaran dan penyelesaian pekerjaan.
- c) Koordinasi lintas unit, PPK, penyedia, dan konsultan pengawas perlu ditingkatkan secara intensif.
- d) Persiapan peresmian Kampung Nelayan Merah Putih harus dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, dengan memastikan kesiapan lokasi dan kelengkapan data dukung.



Gambar 2. Dokumentasi Pembahasan kegiatan Evaluasi Progres Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Pembangunan KNPM tanggal 6 Januari 2026

5. Pembahasan Progres dan Tindak Lanjut Program Kampung Nelayan Maju/KNMP tanggal 21 Januari 2026, Latar Belakang Rapat dilaksanakan untuk membahas perkembangan implementasi Program Kampung Nelayan Maju/KNMP, khususnya terkait hasil asesmen dan survei lokasi, kesiapan perencanaan teknis (DED), mekanisme pengadaan, penganggaran, kehumasan, serta tindak lanjut arahan Menteri KP dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Pokok-Pokok Pembahasan :

- A. Koordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Arahan Menteri
- 1) KSP menyampaikan rencana peresmian KNMP bersama MBG dalam waktu dekat serta dukungan lintas sektor (listrik, BBM, dan infrastruktur pendukung).
 - 2) Menteri KP menekankan pentingnya penguatan dashboard pelaporan kinerja yang menampilkan capaian nyata, antara lain jumlah nelayan penerima manfaat, peningkatan pendapatan, serta progres infrastruktur.
 - 3) Dashboard diminta dilengkapi narasi capaian dan dokumentasi visual (film dan materi publikasi).
- B. Hasil Asesmen dan Survei Lokasi KNMP
- 1) IPB telah menyelesaikan asesmen terhadap ± 1.000 lokasi melalui desk study, serta survei lapangan terhadap 250 lokasi berdasarkan adendum.
 - 2) Dari 250 lokasi tersebut, data telah difinalkan dan siap masuk tahap survei perencanaan.
 - 3) Masih terdapat isu pending terkait integrasi data lintas kementerian/lembaga, khususnya data kelistrikan, jalan, jalur pelayaran, serta lokasi yang bersinggungan dengan AL.
 - 4) Validasi akhir hasil IPB dijadwalkan pada hari Jumat, dengan Tim Sosial Ekonomi (Sosek) akan diundang untuk pembahasan tindak lanjut.
- C. Keterlibatan Perguruan Tinggi Lain
- 1) Sesuai arahan Menteri KP, selain IPB akan dilibatkan perguruan tinggi lain yang berlokasi dekat dengan wilayah usulan KNMP.

- 2) KAK untuk kampus selain IPB akan disusun tersendiri, menyesuaikan ruang lingkup, standar biaya, dan mekanisme masing-masing perguruan tinggi.
- 3) Ditekankan perlunya keseragaman metode dan standar agar hasil survei tetap comparable.

D. Perencanaan Teknis dan DED

- 1) Untuk percepatan, satu penyedia jasa perencana idealnya menangani maksimal 20–25 lokasi.
- 2) Waktu penyusunan DED diperkirakan ± 30 hari, dengan target 8 lokasi pertama telah selesai desain dalam 15 hari awal.
- 3) Proses survei, perencanaan, dan review diupayakan berjalan paralel guna mempercepat kesiapan konstruksi.

E. Mekanisme Pengadaan dan Juknis

- 1) Juknis tahun 2026 masih dalam proses dan menunggu paraf Setjen.
- 2) Mekanisme Penunjukan Langsung (PL) mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2025, dengan syarat konfirmasi program prioritas dari Setneg.
- 3) Proses administrasi PL diperkirakan memerlukan waktu ± 2 –3 bulan.
- 4) Disampaikan opsi kontrak payung dan mekanisme hub and feeder untuk percepatan pelaksanaan.

F. Penganggaran

- 1) Total pagu indikatif program KNMP $\pm \text{Rp}5,39$ triliun, termasuk belanja jasa $\pm \text{Rp}113$ miliar yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, survei, dashboard, dan dukungan nonfisik.
- 2) Terdapat RO Direktif Presiden yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan survei tambahan apabila diperlukan.
- 3) Ditekankan perlunya pemetaan lokasi prioritas (35 lokasi awal dan lanjutan 215 lokasi) agar pembukaan blokir anggaran dapat dipercepat.

6. Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026, latar belakang Kegiatan diselenggarakan dalam rangka evaluasi progres pelaksanaan Program Kampung Nelayan Maju (KNMP), khususnya terkait penyelesaian administrasi dan pembayaran kontrak konstruksi tahun 2025, hasil asesmen dan redesign lokasi, kesiapan perencanaan teknis (DED), mekanisme pengadaan, penganggaran, serta penguatan pelaporan kinerja program sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kantor Staf Presiden.

Pokok-Pokok Pembahasan :

a) Arahan Pimpinan dan Koordinasi Lintas Kementerian

- Program KNMP merupakan program prioritas nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor.
- Dashboard kinerja diminta menampilkan capaian riil (profil nelayan, kapal, kondisi awal dan target pasca-intervensi), dilengkapi narasi serta dokumentasi visual.
- Paparan kepada Menteri KP dan KSP harus berbasis data, timeline, dan capaian terukur.

b) Hasil Asesmen dan Redesign Lokasi

- Telah dilakukan desk study terhadap ± 1.000 lokasi dan survei lapangan terhadap 250 lokasi.
- Sebanyak 35 lokasi prioritas diminta telah selesai redesign, termasuk gambar teknis dan RAB, paling lambat akhir minggu berjalan.
- Redesign menekankan keterbacaan bangunan utama, sentra kuliner, tambatan perahu, serta komponen nonfisik pendukung.

c) Perencanaan Teknis dan Timeline

- Penyusunan DED dilaksanakan secara bertahap dan paralel.
- Seluruh PPK diminta menyusun kurva-S dengan estimasi waktu pelaksanaan ± 6 bulan per lokasi.
- Lokasi dengan kesiapan paling lengkap (memiliki tambatan perahu dan

dukungan infrastruktur dasar) diprioritaskan.

d) Pengadaan dan Administrasi Kontrak

- Konfirmasi dilakukan terhadap kontrak yang telah berjalan, termasuk 14 lokasi yang telah mencapai progres 100%.
- Mekanisme kontrak dan penyesuaian administrasi pembayaran diverifikasi bersama PBJ dan Itjen.
- Inventarisasi dokumen kontrak, addendum, MC, BAP, BAST, dan kelengkapan pembayaran dilakukan secara menyeluruh.

Tabel 5. Tindak Lanjut Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Target Waktu
1	Finalisasi <i>redesign</i> , gambar teknis, dan RAB 35 lokasi prioritas	Tim Teknis & Konsultan Perencana	Minggu IV Jan 2026
2	Penyusunan kurva-S dan <i>timeline</i> pelaksanaan seluruh lokasi	Seluruh PPK	Minggu IV Jan 2026
3	Verifikasi dan penyelesaian dokumen administrasi pembayaran kontrak KNMP 2025	Tim Keuangan, PBJ, Itjen	Jan 2026
4	Penyusunan bahan paparan pimpinan (profil lokasi, <i>redesign</i> , RAB, capaian)	Tim Program & Roren	Jan 2026
5	<i>Update</i> progres lokasi Padang Sarai dan Flores Timur	Tim Teknis	Jan 2026
6	Penguatan <i>dashboard</i> kinerja dan dokumentasi publikasi KNMP	Tim IT & Humas	Feb 2026



Gambar 3. Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026



Gambar 5. Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026



Gambar 6 . Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026

7. Koordinasi dan Klarifikasi Usulan Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 di Pulau Papua, tanggal 9 Februari 2026. Hasil pembahasan agenda tersebut antara lain :

PEMBAHASAN

A. Arahan Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap :

- 1) Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat ekosistem ekonomi perikanan di daerah.
- 2) Pelaksanaan KNMP Tahun 2026 di Pulau Papua harus berbasis kebutuhan riil daerah, kesiapan lokasi, serta dukungan pemerintah daerah.
- 3) Ditekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah serta kejelasan status lahan calon lokasi kegiatan.

B. Pemaparan Kriteria dan Persyaratan Usulan Lokasi KNMP

- 1) Calon lokasi harus memenuhi prinsip clear, clean, and free (CCF), khususnya terkait status dan legalitas lahan.
- 2) Usulan wajib dilengkapi proposal teknis dan data dukung sesuai ketentuan.
- 3) Pendekatan pengembangan dilakukan melalui sistem klaster yang terdiri dari lokasi hub dan penyangga, dengan memperhatikan konektivitas logistik dan karakteristik wilayah.

C. Pembahasan Klarifikasi Usulan Daerah

- 1) Klarifikasi dilakukan melalui pembagian breakout room per wilayah provinsi.
- 2) Pemerintah daerah memaparkan daftar calon lokasi, kesiapan lahan, serta dukungan sarana dan prasarana.
- 3) Tim KKP memberikan masukan terkait kelengkapan dokumen, kesesuaian kriteria, serta potensi pengembangan lokasi.
- 4) Ditemukan masih adanya usulan yang perlu dilengkapi, khususnya terkait legalitas lahan, data sosial ekonomi nelayan, dan kesesuaian dengan konsep klaster.

D. Kesimpulan Rapat

- 1) Pemerintah daerah diminta melakukan penyempurnaan usulan calon Lokasi KNMP Tahun 2026.
- 2) Seluruh dokumen usulan dan data dukung wajib diunggah melalui sistem yang telah ditentukan.
- 3) KKP akan melakukan evaluasi dan verifikasi lanjutan terhadap usulan yang telah dilengkapi.

8. Pertemuan dalam rangka Koordinasi dan Konsolidasi Satuan Tugas Kampung Nelayan Merah Putih tanggal 18 Februari 2026, hasil pembahasan antara lain :

Pokok-Pokok Pembahasan

- A. Penegasan Komitmen dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan 1.000 lokasi KNMP Tahun 2026 merupakan program prioritas nasional yang memerlukan kerja luar biasa (extraordinary effort).
- B. Diperlukan percepatan khususnya di wilayah Indonesia Timur, meliputi Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Tim diminta segera melakukan kunjungan lapangan ke Papua untuk koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan memastikan kesiapan lokasi.
- C. Kesiapan Lahan dan Penetapan Lokasi, dari usulan lokasi di Papua, belum seluruhnya memiliki kesiapan lahan dan ditekankan agar tidak menunggu seluruh proses survei selesai untuk memulai tahapan pekerjaan yang telah siap.
- D. Perlu percepatan penetapan tahap berikutnya agar proses konstruksi tidak tertunda untuk skema Pembayaran dan Seleksi Penyedia. Skema pembayaran 40%-40%-20% dinilai perlu dikaji kembali efektivitasnya.
- E. Diperlukan arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait kemungkinan penyesuaian skema untuk menjaga arus kas penyedia. Seleksi penyedia harus dilakukan secara ketat dan objektif untuk memastikan kemampuan finansial dan teknis.
- F. Bagi penyedia yang terbukti tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik, diusulkan untuk dilakukan evaluasi dan pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).

G. Khusus Wilayah Papua :

- 1) Mengacu pada ketentuan yang berlaku, terdapat kewajiban melibatkan penyedia lokal, serta diperlukan identifikasi dan pemetaan kemampuan penyedia lokal secara cermat guna menghindari risiko kegagalan pelaksanaan.
- 2) Koordinasi dengan Kepala Dinas setempat untuk memperoleh data penyedia yang kredibel.

H. Evaluasi Tahap I dan II (Lesson Learned)

- 1) Masih ditemukan kelemahan dalam survei teknis (khususnya pengukuran topografi dan volume pekerjaan).
- 2) Perlu waktu dan anggaran memadai bagi tim perencana untuk melakukan survei detail dan akurat.
- 3) Administrasi penyedia masih lemah, khususnya dalam penyusunan dokumen as-built drawing dan kelengkapan kontraktual. Pada tahap 1.000 lokasi, disarankan dipersyaratkan personel kunci tambahan (site manager, quantity surveyor, drafter, surveyor/topografi).
- 4) Setiap kegiatan Satgas wajib terdokumentasi dan dibuatkan notulen resmi sebagai bahan laporan perkembangan kepada pimpinan serta Perlu penunjukan personel khusus yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan pelaporan kegiatan KNMP Tahun 2026.

I . Arahan Pimpinan

- ✓ Melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah Timur dengan prioritas Papua.
- ✓ Menyusun materi paparan yang seragam untuk seluruh tim dalam pelaksanaan kunjungan lapangan. Memastikan kesiapan data penyedia serta melakukan survei pasar (*market sounding*) sebelum proses pemilihan.
- ✓ Rapat menegaskan bahwa pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 memerlukan sinergi, integritas, dan percepatan terukur guna memastikan target 1.000 lokasi dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.



Gambar 7. Dokumentasi Pembahasan Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Kontrak Konstruksi Pembangunan KNMP 2025 tanggal 20 -23 Januari 2026

9. Pertemuan dalam rangka Koordinasi usulan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 27 Maret 2026, pokok-pokok Pembahasan

A. Arahan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

1) Progres pembangunan KNMP:

- 65 lokasi tahap I hampir selesai ($\pm 95\%$).
- 35 lokasi tahap II masih berjalan ($\pm 35\%$).

2) Dari 518 desa pesisir (data Potensi Desa/BPS), telah disurvei 167 lokasi, dengan ± 80 lokasi dinilai layak.

3) Fokus percepatan penetapan lokasi di Papua.

4) Validasi data lapangan dengan data BPS sangat diperlukan.

5) Lokasi dalam kawasan konservasi tetap dapat disurvei dengan penyesuaian

B. Paparan Kepala BBSREKP

1) Konsep KNMP berbasis klaster:

- Hub: pusat agregasi, pengolahan, distribusi.
- Penyangga: feeder/pengumpul produksi nelayan.

2) Pembangunan tidak hanya fisik, tetapi pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.

3) Kriteria lokasi: lahan clear and clean, aksesibilitas, dukungan masyarakat dan pemerintah daerah.

4) Tujuan: penguatan perikanan skala kecil dan integrasi rantai pasok hingga pasar nasional/ekspor.

C. Arahan Moderator dan Tim Teknis :

- Seluruh desa pesisir Papua (± 518 desa) diharapkan dapat disurvei.
- Usulan lokasi harus dilengkapi koordinat, status lahan, dan dokumen pendukung.
- Pengusulan dilakukan melalui sistem Jotform.
- Prioritas: lokasi sekitar KNMP existing sebagai penyangga.
- Batas waktu pengusulan dan survei: akhir April 2026.
- Target penetapan lokasi: Mei 2026.

D. Arahan Inspektorat Jenderal KKP :

- Validitas data menjadi kunci utama.
- Permasalahan utama: status lahan tidak clear and clean.
- Ditekankan: penyampaian data harus cepat dan akurat, survei lapangan efisien dan tepat sasaran.

E. Kesimpulan secara umum :

- Pembangunan KNMP 2026 difokuskan pada pendekatan klaster (Hub dan Penyangga).
- Validasi dan percepatan usulan lokasi menjadi prioritas utama.
- Papua menjadi wilayah fokus percepatan pembangunan.
- Dukungan pemerintah daerah (legalitas lahan, infrastruktur, perizinan) sangat menentukan keberhasilan program.
- Batas waktu pengusulan dan verifikasi lokasi ditetapkan hingga April 2026.

F. Secara umum, beberapa kendala yang berdampak signifikan terhadap proses pembangunan KNMP, yaitu meliputi :

- a. keterbatasan pasokan material di lokasi pembangunan;
- b. kondisi cuaca yang didominasi oleh curah hujan tinggi seringkali menghambat aktivitas konstruksi;
- c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi berkualitas masih sangat terbatas;
- d. kondisi lahan pembangunan tergolong kurang memadai, sehingga membutuhkan penanganan tambahan;
- e. aksesibilitas lokasi pembangunan cukup sulit, sehingga menghambat mobilitas material;
- f. masih ditemukan konflik horizontal di sekitar lokasi pembangunan.

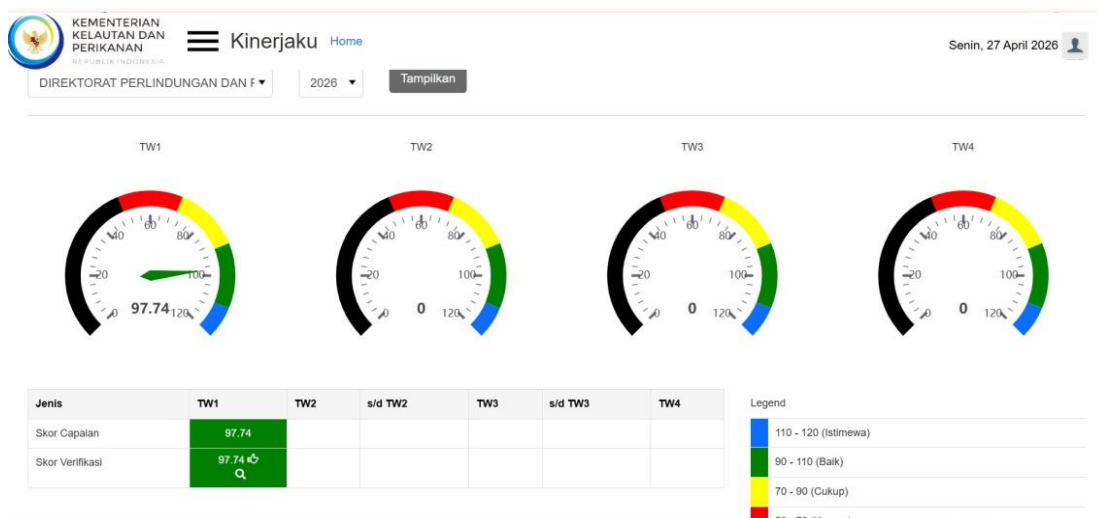


Gambar 8. Dokumentasi Pertemuan dalam rangka Koordinasi usulan calon lokasi (KNMP) Tahun 2026 tanggal 27 Maret 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I Tahun 2026 seperti pada gambar berikut:



Gambar 9. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memperoleh nilai sebesar **97,74 %**. Direktorat

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memiliki 3 Sasaran kegiatan dan 10 Indikator Kinerja. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada periode Triwulan I Tahun 2026 kategori **Baik**. Ini bisa dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerjaku yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

Tabel 6. Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Triwulan I, Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	CAPAIAN 2026	
					Triwulan I	% thd Target
1	Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	7,18	7,18
		2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	2500	1033	41,32
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (Lokasi)	250	-	-
		4	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	21	21
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	5	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	50	7,2	14,4
		6	Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)	10	-	-
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	84,5	-	-
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88,2	-	-
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	86	100	100
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98,6	-	-

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

3.2.1 Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (Lima) indikator yakni (1) Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya, (2) Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (3) Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (4) Persentase nelayan yang terlindungi.

1. Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya

Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya adalah jumlah nelayan yang diharapkan dapat difasilitasi pengembangan usahanya melalui (1) Kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya, (2) Kegiatan fasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan.

Tabel. 7 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase Nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	100	7,18	7,18

Tabel 8. Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya

SS 1 Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing											
IKU 1 Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)											
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target 2026	Target Renstra 2026	% Capaian TW I terhadap Target Akhir Renstra
-	-	-	-	24,29	100	8	7,18	89,75	7,18	100	89,75

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan terbentuk sekitar peretengahan tahun 2025 (sekitar bulan April) merupakan pemekaran dari

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, namun Capaian IKU ini melekat pada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada Triwulan I Tahun 2025 capaian IKU tersebut sebesar 24,29 % jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2026 hal ini terkendala dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan diawal tahun 2026.

2. Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan

Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan adalah nelayan yang memiliki tanah baik lahan hunian maupun lahan kosong/produktif untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi bersertifikat sesuai dengan ketentuan. Kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan (bank dan non bank). Adapun kegiatan dilakukan berupa sosialisasi pra dan pasca SeHAT nelayan, identifikasi lapang dan pendampingan. Target tahun 2026 sebanyak 2500 CPCL. Sampai saat ini baru tercapai sebanyak 1.033 CPCL atau sebesar 41,32% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Tabel. 9 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW IV	%
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan.	2.500	1033	41,32

Tabel 10. Capaian Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

SS 1	Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing										
IKU 2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)										
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target 2026	Target Renstra 2026	% Capaian TW I terhadap Target Akhir Renstra
-	-	-	-	1.250	2500	200	1033	516,5	41,32	5000	10,33

Pada tabel perbandingan Capaian IKU Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan dapat dilihat pada Triwulan I tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2026 hal ini sama karena terkendala dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan diawal tahun 2026.

Pelaksanaan Kegiatan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan

pelaksanaan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta penguatan kepastian hukum hak atas tanah, telah dilaksanakan kegiatan **Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SHAT Nelayan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026** pada tanggal 4 Maret 2026 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Kota Cirebon, berikut ringkasan hasil kegiatan tersebut.

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, salah satu upaya strategis yang dilaksanakan adalah pemberian kepastian hukum atas tanah melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses nelayan terhadap sumber daya ekonomi, memberikan perlindungan terhadap aset yang dimiliki, serta mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan telah melaksanakan Kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SHAT Nelayan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 pada tanggal 4 Maret 2026 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Kota Cirebon. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program sampai dengan tahun 2025, telah dilakukan sertifikasi terhadap sejumlah bidang tanah nelayan di Provinsi Jawa Barat, namun capaian tersebut masih belum optimal dibandingkan dengan target yang ditetapkan, serta masih terdapat bidang tanah nelayan yang belum tersertifikasi. Selain itu, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, antara lain ketidaksinkronan data antar instansi, belum optimalnya kualitas dan kelengkapan data calon penerima (CPCL), serta kendala teknis dan administratif di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah sinergi dan sinkronisasi yang lebih terintegrasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memastikan ketepatan sasaran, serta mempercepat pencapaian target sertifikasi tanah nelayan pada tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undangan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Nomor B.565/DJPT.6/PI.420/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 perihal Undangan Kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SHAT Nelayan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ;
- b. Kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah;
- c. Hasil pelaksanaan kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi SHAT Nelayan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

3. Hasil Kegiatan

- a. Capaian Pelaksanaan
 1. Sampai dengan tahun 2025 telah dilakukan sertifikasi terhadap ± 435 bidang tanah nelayan di Provinsi Jawa Barat ;
 2. Program telah berjalan namun capaian belum optimal dibandingkan target yang ditetapkan;
 3. Masih terdapat backlog sekitar ± 2.000 bidang tanah nelayan yang belum tersertifikasi di Provinsi Jawa Barat .

b. Kondisi Pelaksanaan di Daerah

1. Terdapat perbedaan data antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Sebagian data CPCL belum memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
3. Realisasi sertifikasi belum sebanding dengan jumlah usulan yang diajukan.

c. Permasalahan

1. Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi data antar instansi;
2. Kualitas data CPCL belum memenuhi kelengkapan yuridis dan fisik;
3. Keterbatasan dan penyesuaian alokasi anggaran;
4. Terdapat tumpang tindih pelaksanaan program (antara lain PTL dan Lintor);
5. Kendala teknis terkait status lahan, termasuk kawasan kehutanan;
6. Koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal.

d. Analisis

1. Permasalahan utama pelaksanaan program berada pada tahap pra-sertifikasi, khususnya pada aspek ketersediaan dan validitas data;
2. Ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran serta inefisiensi pelaksanaan program;
3. Diperlukan penguatan tata kelola data dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan program.

e. Tindak Lanjut yang Diperlukan

1. Melaksanakan sinkronisasi dan validasi data CPCL secara menyeluruh antara KKP, ATR/BPN, dan pemerintah daerah;
2. Mendorong percepatan pengumpulan dan verifikasi data yuridis dan fisik;
3. Melaksanakan kegiatan pengukuran lapangan secara bertahap dan terjadwal;
4. Menyusun target pelaksanaan tahun 2026 dan 2027 secara realistis dan

- berbasis kesiapan data;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui forum bersama dan mekanisme berbagi data
 6. Melakukan identifikasi kembali bidang tanah yang belum dapat disertifikasi untuk diusulkan pada tahun berikutnya

4. Kesimpulan

Hasil Kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Nelayan Prov. Jabar Tahun 2026, disimpulkan bahwa program berjalan dan memberikan capaian, namun masih belum optimal dalam memenuhi target yang ditetapkan. Permasalahan utama meliputi belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi data antar instansi, belum terpenuhinya kelengkapan data calon penerima (CPCL), serta kendala teknis, administratif, dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, diperlukan langkah percepatan melalui penguatan tata kelola data, peningkatan koordinasi lintas sektor, penataan target dan prioritas pelaksanaan yang berbasis pada kesiapan data dan kondisi riil di daerah.

DOKUMENTASI

KEGIATAN SINERGI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN SHAT NELAYAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan SHAT Nelayan Prov. Jawa Barat Tahun 2026

3. Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya

Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya adalah kampung nelayan Merah Putih yang dibangun atau diperbaiki fasilitas umum dan fasilitas usahanya melalui kegiatan yang berasal dari pendanaan oleh instansi pemerintah, BUMN, Swasta atau swadaya masyarakat. Tujuan dari penataan kampung nelayan Merah Putih adalah terciptanya kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Pada tahun 2026 IKU ini ditargetkan sebanyak 250 lokasi. Adapun pelaporan capaian IKU ini baru bisa dilaporkan pada akhir tahun karena periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel. 11 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (Lokasi)	250	-	-

4. Persentase nelayan yang terlindungi

Persentase Indikator yang menunjukkan kegiatan pendataan nelayan dan kelompok usaha nelayan yang tervalidasi dalam sistem KUSUKA terhadap kepemilikan identitas resmi dan basis data yang terintegrasi dan kegiatan fasilitasi perlindungan nelayan terhadap resiko usaha maupun resiko keselamatan.

Adapun beberapa kegiatan dalam persentase Indikator ini adalah :

1. Identifikasi / Pendataan Nelayan (KUSUKA)
2. Identifikasi / Pendataan Kelompok Usaha Nelayan (KUSUKA)
3. Penanganan Nelayan Lintas Batas
4. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Nelayan
5. Fasilitasi Perlindungan Nelayan

Tabel. 12 Persentase nelayan yang terlindungi

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase nelayan yang terlindungi	100	21	21

Tabel. 13 Perbandingan Capaian Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat Kapasitasnya

SS 1	Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing										
IKU 4	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)										
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target 2026	Target Renstra 2026	% Capaian TW I terhadap Target Akhir Renstra
-	-	-	-	11,25	100	20	21	105	21	100	105

Capaian IKU ini tahun 2025 Triwulan I sebesar 11,25 %, pada triwulan I Tahun 2025 IKU ini masih tergabung di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Setelah terjadi pemekaran Organisasi IKU ini tergabung dalam Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sehingga Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama karena metode perhitungan berbeda dengan metode perhitungan tahun sebelumnya sehingga hasil capaian juga berbeda. Capaian Triwulan 1 Tahun 2026 sebesar 21 % dari target yang ditetapkan.

3.2.2 Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha

1. Persentase Kelompok Usaha bersama yang meningkat kapasitasnya

Persentase Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya adalah Kelompok Usaha Bersama yang diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan KUB. Adapun Jumlah KUB yang mendapat pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18 KUB di Triwulan 1 tahun 2026 sedangkan jumlah KUB yang menjadi target pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya Tahun Anggaran 2026 sebanyak 250 KUB. Capaian Persentase KUB yang meningkat kapasitasnya pada Triwulan 1 sebesar 7,2 % dari target yang ditetapkan.

Tabel 14. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen).	50	18	7,2

Tabel 15. Tabel Capaian Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat Kapasitasnya

Satuan persen

SS 2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha											
IKU 5	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)											
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT		
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target 2026	Target Renstra 2026	% Capaian TW I terhadap Target Akhir Renstra	
-	-	-	-	39,73	50	10	7,2	72	14,4	65	110,7692308	

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya karena perhitungan IKU ini berbeda dengan IKU tahun sebelumnya. Meskipun demikian kegiatan peningkatan KUB merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan, namun tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)

Merupakan Jumlah kelembagaan usaha nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola, pengembangan model bisnis usaha perikanan tangkap, serta pembinaan dalam membangun kerjasama kemitraan dengan kelembagaan usaha lainnya.

Adapun pelaporan capaian IKU ini baru bisa dilaporkan pada akhir tahun karena periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel. 16. Kelembagaan Ekonomi Nelayan Yang Difasilitasi Pengembangan usahanya

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)	10	-	-

3.2.3 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 4 (Empat) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (2) Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (4) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar.
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai kompetensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut :
 - (a) Pejabat Struktural dihitung dengan komponen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR
 - (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR
 - (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran berikut capaian pada periode triwulan I Tahun 2026.

Tabel. 17 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	84,5	-	-

2. Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun **capaian** nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada triwulan I belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Tabel 18. Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I 2026	%
Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	88,2	-	-

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan LHP mendapat capaian IKU triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 100 %.

Tabel.19 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian Triwulan I	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	86	100	100

Tabel. 20 Perbandingan Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

SS 3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan										
IKU 9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan										
Realisasi TW I 2021-2025					Realisasi 2026					Renstra DJPT	
TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	TW I 2024	TW I 2025	Target Tahun 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi terhadap Target TW I 2026	% Realisasi terhadap Target 2026	Target Renstra 2026	% Capaian TW I terhadap Target Akhir Renstra
-	-	-	-	60	86	86	100	116,28	116,28	89	130,65

Pada tabel perbandingan Capaian IKU Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dapat dilihat pada Triwulan I tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 hal ini didukung dengan sistem pengawasan yang semakin terkontrol dengan baik dan sistem organisasi yang terstruktur.

4. **Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan**

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel. 21 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Nama IKU	Target Tahun 2026	Capaian TW I	%
Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	98	-	-

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.147.980.037.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA- DIPA-032.03.1.238720/2026 tanggal 01 Desember 2025. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2026, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026								
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;								
Periode April 2026								
Kementerian	: 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Unit Organisasi	: 03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP						
Satuan Kerja	: 238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP						
Hal 1 dari 2								
Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA		5,091,159,018,000	17,129,080,000	10,535,665,354	5,905,620,075	16,441,285,429	0.32 %	5,057,588,652,571
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		5,091,159,018,000	17,129,080,000	10,535,665,354	5,905,620,075	16,441,285,429	0.32 %	5,057,588,652,57
HB.7940 Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan		5,091,159,018,000	17,129,080,000	10,535,665,354	5,905,620,075	16,441,285,429	0.32 %	5,057,588,652,57
BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat		585,389,000	0	8,775,000	0	8,775,000	1.50 %	576,614,000
BDC.001 Nelayan yang difasilitasi perlingdangannya		496,812,000	0	8,775,000	0	8,775,000	1.77 %	488,037,000
BDC.002 Awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlingdangannya		88,577,000	0	0	0	0	0.00 %	88,577,000
FAN Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		122,912,080,000	0	0	0	0	0.00 %	122,912,080,000
FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden		122,912,080,000	0	0	0	0	0.00 %	122,912,080,000
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat		2,170,981,000	0	127,624,880	0	127,624,880	5.88 %	2,043,356,120
QDC.001 Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya		563,246,000	0	122,280,000	0	122,280,000	21.71 %	440,966,000
QDC.002 Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya		862,445,000	0	1,120,880	0	1,120,880	0.13 %	861,324,120
QDC.003 Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya		745,290,000	0	4,224,000	0	4,224,000	0.57 %	741,066,000
QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		11,188,659,000	0	284,844,303	193,500,000	478,344,303	4.28 %	10,710,314,697
QDD.001 Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya		7,538,329,000	0	284,844,303	0	284,844,303	3.78 %	7,253,484,697
QDD.004 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)		92,381,000	0	0	0	0	0.00 %	92,381,000
QDD.005 Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah putih Kelautan dan Perikanan		3,557,949,000	0	0	193,500,000	193,500,000	5.44 %	3,364,449,000
QEA Bantuan Masyarakat		2,186,399,000	0	0	0	0	0.00 %	2,186,399,000
QEA.001 Bantuan Premi Asuransi Nelayan		2,186,399,000	0	0	0	0	0.00 %	2,186,399,000
QEH Bantuan Kelompok Masyarakat		4,949,587,457,000	17,129,080,000	10,114,421,171	5,698,819,655	15,813,240,826	0.32 %	4,916,645,136,17
QEH.001 Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya		4,946,453,476,000	17,129,080,000	10,114,421,171	5,698,819,655	15,813,240,826	0.32 %	4,913,511,155,17
QEH.002 Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)		80,000,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000,000
QEH.005 Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - Ocean for Prosperity Project (Lautra)		3,053,981,000	0	0	0	0	0.00 %	3,053,981,000
QKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		965,275,000	0	0	0	0	0.00 %	965,275,000
QKA.001 Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya		403,823,000	0	0	0	0	0.00 %	403,823,000
QKA.002 Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya		403,354,000	0	0	0	0	0.00 %	403,354,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode April 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Satuan Kerja : 238720 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QKA.003 Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	74,474,000	0	0	0	0	0.00 %	74,474,000
QKA.004 Kelompok Nelayan yang diidentifikasi kampung nelayannya untuk difasilitasi penataannya	83,624,000	0	0	0	0	0.00 %	83,624,000
QMAData dan Informasi Publik	1,562,778,000	0	0	13,300,420	13,300,420	0.85 %	1,549,477,580
QMA.001 Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan	1,562,778,000	0	0	13,300,420	13,300,420	0.85 %	1,549,477,580

IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I Tahun 2026 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar **97,74** persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.

1. IKU 1 Capaian dari Target sebesar 7,18 %
2. IKU 2 Capaian dari Target sebesar 41,32 %
3. IKU 3 Capaian dari Target sebesar -
4. IKU 4 Capaian dari Target sebesar 21 %
5. IKU 5 Capaian dari Target sebesar 14,4 %
6. IKU 6 Capaian dari Target sebesar -
7. IKU 7 Capaian dari Target sebesar -
8. IKU 8 Capaian dari Target sebesar -
9. IKU 9 Capaian dari Target sebesar 100 %
10. IKU 10 Capaian dari Target sebesar -

4.1.2 SARAN

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah sebagai berikut :

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator Kinerja, Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala, Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

4.2 TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang akan ditindak lanjuti pada perbaikan pengelolaan kinerja yang tidak mencapai target :

- a. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
- b. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan.

DATA DUKUNG CAPAIAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOTA DINAS
NOMOR 322/DJPT.6/RC.610/IV/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I Tahun 2026
Tanggal : 15 April 2026

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I, Tahun 2026 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Triwulan I, Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Mahrus

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran
 Nomor : 322/DJPT.6/RC.610/IV/2026
 Tanggal : 15 April 2026

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 Triwulan I, Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2026	Triwulan I	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan yang berdaya saing	1	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100	7,18	7,18
		2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	2500	1033	41,32
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	250	-	-
		4	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100	21	21
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan Melalui Fasilitas Penguatan Usaha	5	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	50	7,2	14,4
		6	Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)	10	-	-
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	84,5	-	-
		8	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88,2	-	-
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	86	100	100
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98,6	-	-

- a. SK1 Pengelolaan Kenelayanan yang berdaya saing
 IKU 1. Presentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)

PERSENTASE NELAYAN YANG TERFASILITASI PENGEMBANGAN USAHANYA			
IKU	Jumlah Capaian	Konversi KUB	Keterangan
Pembiayaan	65	6	asumsi 1 KUB = 10 orang/Nelayan ->
Diversifikasi	294	29	asumsi 1 Koperasi = 10 KUB

FND	294
FNP	65
TFND	2500
TFNP	2500

$$\begin{aligned}
 NF &= \frac{0,1176 + 0,026}{2} \times 100 \\
 &= \frac{0,1436}{2} \times 100 \\
 &= 0,0718 \times 100 \\
 &= 7,18
 \end{aligned}$$

Pengelolaan Kenelayanan yang Berdaya Saing

NAMA IKU 1 : PERSENTASE NELAYAN YANG TERFASILITASI PENGEMBANGAN USAHANYA (PERSEN)

DEFINISI

Nelayan yang diharapkan dapat difasilitasi pengembangan usahanya melalui pembinaan :

1. kegiatan pengembangan Diversifikasi usaha nelayan dan keluarganya
2. kegiatan fasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan

FORMULA PERHITUNGAN

$$NF = \left(\frac{\left(\frac{FND}{TFND} \right) + \left(\frac{FNP}{TFNP} \right)}{2} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- NF : Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya
 FND : Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan diversifikasi usaha
 TFND : Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitasi pengembangan diversifikasi usaha TA 2026 (2500 orang)
 FNP : Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan usaha nelayan
 TFNP : Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitasi pembiayaan usaha nelayan TA 2026 (2500 orang)

Rekap Capaian Tim Kerja DPUN

1. Fasilitasi Akses Pembiayaan Usaha Nelayan

No.	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Daring	65
TOTAL		65

2. Fasilitasi Diversifikasi Usaha Nelayan

No.	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Cirebon	18
2	8 Lokasi KNMP	276
TOTAL		294

- b. SK1 Pengelolaan Kenelayanan yang berdaya saing
IKU 2 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

No	Provinsi	Usulan CPCL
1	Aceh	103
2	Riau	153
3	Jawa Tengah	27
4	Jawa Timur	320
5	Nusa Tenggara Timur	82
6	Kalimantan Tengah	104
7	Sulawesi Selatan	233
8	Sulawesi Tenggara	11
	Total	1033

- c. SK1 Pengelolaan Kenelayanan yang berdaya saing
IKU 4 Persentase nelayan yang terlindungi.

FORMULA PERHITUNGAN Presentase Nelayan = $(FPU/TFPU) \times 100 \%$					
KETERANGAN FPU : Jumlah Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan TFPU : Jumlah Nelayan yang ditargetkan teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan (100.000)					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">FPU :</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">839.207</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">TFPU :</td> <td style="padding: 2px 5px; text-align: center;">100.000</td> </tr> </table>	FPU :	839.207	TFPU :	100.000	Persentase nelayan yang terlindungi = $(839.207 / 100.000) \times 100$ = $8,39207 \times 100$ = 839,207 = 839
FPU :	839.207				
TFPU :	100.000				

FORMULA PERHITUNGAN

$$\text{Persentase nelayan Kelompok Usaha} = (\text{FPB} / \text{TFPU}) \times 100 \%$$

KETERANGAN

FPB : Jumlah Nelayan Kelompok Usaha yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan

TFPU : Jumlah Nelayan yang ditargetkan teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan (100.000)

FPB :	3.740
TFPU :	100.000

$$\begin{aligned} \text{Persentase nelayan yang terlindungi} &= (3.740 / 100.000) \times 100 \\ &= 0,0374 \times 100 \\ &= 3,74 \\ &= 3,7 \end{aligned}$$

ID	NAMA	NO KUSUMA	PROVINSI KTP	KABUPATEN KTP	Kecamatan KTP	Desa KTP	JENIS USAHA	JENIS PERAIRAN	BENTUK USAHA
➤	RIZAL TAMHER	910901107900003	PAPUA TENGAH	MIKKA	MIKKA BARU	KOPERAPOKA	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	SARMAN	6332011807010001	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	PULAU LUT SIGAM	HILIR MURAI	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	KASMI	7310080503910003	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI KARTANEGARA	MURAI JAYA	MURAI JAYA	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	DNIS YOHANES NASENG	910901251900002	PAPUA TENGAH	MIKKA	WANA	ILUUSA	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	ZEFANYA MAJIY	9271062301540001	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	SORONG MANGI	KJALUSI	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	YOHANIS PAKJAWA	9109030106770001	PAPUA TENGAH	MIKKA	MIKKA TIMUR	HISPAU	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	ARIANTO BAROMBANG	7291070210830001	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	PAIDMANA	SAMMAJATEM	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	SIPRIANUS NANI	9109032607070001	PAPUA TENGAH	MIKKA	MIKKA TIMUR	HISPAU	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	ARIFIN EFFENDI	5291312918760009	MUSA TENGAH BAKAT	LOMBEK BARAT	LEMBAR	LEMBAR SELATAN	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan
➤	RUBIN RAYA	1001070405160001	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	PAIDMANA	SAMMAJATEM	Penangkapan ikan di Laut	-	Persewaan

Total Data: 839.207

ID	NAMA	NO KUSUMA	PROVINSI KTP	KABUPATEN KTP	Kecamatan KTP	Desa KTP	JENIS USAHA	JENIS PERAIRAN	BENTUK USAHA	STATUS PROFESI
➤	DESA MERAH PUTIH TANA LUTU	2900205027009	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	HUMAJAL BELAKANG	TANALUTU	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	KETUT BENEN	6704260110244000	BALI	KARANGASEM	KUBU	TULAMBEN	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	KETUT BENEN	6704260110244	BALI	KARANGASEM	KUBU	TULAMBEN	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	KOPERASI DESA MERAH PUTIH SWAHAN CAMPONG ACEH	0904260111446	ACEH	ACEH TIMUR	JO RAYEK	CAMPONG ACEH	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	KOPERASI DESA MERAH PUTIH BIRA TENGAH	2603250038673	JAWA TIMUR	SAMPANG	SOH OBANAH	BIRA TENGAH	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	KOPERASI DESA MERAH PUTIH KARATU	6107250011876	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	KARATU	KARATU	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	POSBAI	6304260037951	LAMPUNG	BAK KANAN	PAJAH RAYU	GUNUNG BARAS	Penangkapan Ikan dan Darat	Sempit	Badan Usaha	Utama
➤	KOPERASI DESA MERAH PUTIH PASERAN	6503260104072	JAWA TIMUR	JEMBER	KENCONG	PASEBAH	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH TENGAH KECAMATAN MULOHTHALANG	2107250017981	GORONTALO	KOTA GORONTALO	MULOHTHALANG	TENGAH	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama
➤	BOTUBULUD	2605250009526	GORONTALO	GORONTALO	BULUH	BOTUBULUD	Penangkapan ikan di Laut	-	Badan Usaha	Utama

Total Data: 3.740

Pengelolaan Kenelayanan yang Berdaya Saing



NAMA IKU 4

: PERSENTASE NELAYAN YANG TERLINDUNGI (PERSEN)

DEFINISI

Indikator yang menunjukkan kegiatan pendataan nelayan dan kelompok usaha nelayan yang tervalidasi dalam sistem KUSUKA terhadap kepemilikan identitas resmi dan basis data yang terintegrasi dan kegiatan fasilitasi perlindungan nelayan terhadap resiko usaha maupun resiko keselamatan.

FORMULA PERHITUNGAN

$$PNyT = NK + KK + NLB + RKP + FP$$

KETERANGAN PERHITUNGAN

PNyT : Presentase Nelayan yang terlindungi

NK : Identifikasi / Pendataan Nelayan (KUSUKA) (20%)

: Identifikasi / Pendataan Kelompok Usaha Nelayan

KK (KUSUKA) (20%)

NLB : Penanganan Nelayan Lintas Batas (20%)

RKP : Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Nelayan (20%)

FP : Fasilitasi Perlindungan Nelayan (20%)

KEGIATAN	PERHITUNGAN TARGET	CAPAIAN KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN TARGET	BOBOT KEGIATAN	PERSENTASE CAPAIAN
Identifikasi / Pendataan Nelayan (KUSUKA) (persen)	Persentase nelayan yang teridentifikasi = $(FPU/TFPU) \times 100 \%$	839	100	100%	20%	20%
Identifikasi / Pendataan Kelompok Usaha Nelayan (KUSUKA) (persen)	Persentase Kelompok Usaha yg teridentifikasi = $(FPU/TFPU) \times 100 \%$	3.74	50	7%	20%	1%
Penanganan Nelayan Lintas Batas (Persen)	Jumlah fasilitasi penanganan nelayan pelintas batas dibandingkan dengan jumlah permohonan fasilitasi penanganan nelayan pelintas batas $PN = (JPN / JPPN) \times 100 \%$	0	50	0%	20%	0%
Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Nelayan (Dokumen)	Jumlah Dokumen rekomendasi yang disusun	0	1	0%	20%	0%
Fasilitasi Perlindungan Nelayan (Laporan): 1. Fasilitasi Peralatan Keselamatan Nelayan kecil 2. Review Regulasi Perlindungan Nelayan 3. Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan Nelayan Pelintas Batas 4. Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Nelayan	Jumlah nelayan yang difasilitasi perlindungan nelayan dibanding jumlah target rencana nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	0	2	0%	20%	0%
						21%

- d. SK2 Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Berdaya Saing
IKU 5 Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya
(Persen)

Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya

$$KUB = \frac{18}{250} \times 100$$

$$= 7,2$$

FKB	18
FTKB	250

Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Berdaya Saing



NAMA IKU 5

PERSENTASE KELOMPOK USAHA BERSAMA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA

(PERSEN)

DEFINISI

Kelompok Usaha Bersama yang diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan KUB

FORMULA PERHITUNGAN

$$KUB = \left(\frac{FKB}{TFKB} \right) \times 100 \%$$

Keterangan :

KUB : Persentase KUB yang meningkat kapasitasnya
FKB : Jumlah KUB yang mendapat pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya
TFKB : Jumlah KUB yang menjadi target pembinaan untuk ditingkatkan kapasitasnya Tahun Anggaran 2026 (250 KUB)

CAPAIAN KUB YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	NAMA KELOMPOK
1	Jawa Barat	Garut	mekarmukti kab garut	karangwangi	MUKTI BAHARI
2	Bengkulu	Kaur	Nasal	Merpas	Laguna
3	Bengkulu	Kaur	Nasal	Merpas	Citra Sejati
4	Bengkulu	Kaur	Nasal	Merpas	Ujung Lancang
5	Lampung	Kota Bandar Lampung	Telukbetung Timur	Keteguhan	Usaha Jaring Harapan
6	Lampung	Lampung Selatan	Ketapang	Ketapang	Banten Jaya I
7	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Jerowaru	Ekas Buana	Pandan Wangi
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Jerowaru	Ekas Buana	Harapan Bersatu
9	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Jerowaru	Ekas Buana	Gonsor Damai
10	Sulawesi Barat	Mamuju	SIMBORO KABUPATEN	SUMARE	TIARA
11	Sulawesi Barat	Mamuju	SIMBORO KABUPATEN	SUMARE	NIRWANA
12	Sulawesi Barat	Mamuju	SIMBORO	SUMARE	NIRMALA
13	Sulawesi Barat	Mamuju	SIMBORO KABUPATEN	SUMARE	MITRA NELAYAN
14	Sulawesi Barat	Mamuju	SIMBORO KABUPATEN	SUMARE	MASANNANG JAYA
15	Jawa Tengah	Purworejo		Kertojayan	Langgeng jaya
16	Sulawesi Selatan	Sinjai	Sinjai Timur	Tongke - Tongke	Setia Kerja
17	Sulawesi Selatan	Sinjai	SINJAI TIMUR	TONGKE TONGKE	-PT BINTANG LAUT
18	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Lunyuk	Emang Lestari	Batu Pampang

- e. SK2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial Yang Baik Lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
 IKU 9 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Persen)

PERHITUNGAN IKU TW I 2026

IKU TW I

OKTOBER 2025 - Desember 2025

JML REKOM	TL REKOM	%
84	84	100,00%

No	Pengawasan	Satker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOVEMBER 2025														
6	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.505/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi atas Rencana Perbaikan Ujung Kapal Hasil Rumpukan yang Akan Diarahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	2	4	-	2	4	-	-	-	-	TUNTAS
7	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.507/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Penghapusan Sebata-sebut dan dan Penjualan Unit 24 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengembangan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
8	Revisi	DIT KAPI	T.508/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Kapal Pemangkap Ikan dalam Rangka Mendukung Program Bantuan KNMP TA 2025 pada Direktorat Kasi Perikanan dan Aul Perikanan dan Aul	2	2	-	2	2	-	-	-	-	TUNTAS
9	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.510/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi atas Aul yang Tidak Ditentukan pada Sekter Perikanan Perikanan Nusantara Tula Provinsi Maluku	1	3	-	1	3	-	-	-	-	TUNTAS
10	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.517/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Penghapusan Sebata-sebut dan dan 28 Unit BMN Gedung dan Bangunan pada PPN Pengembangan	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
11	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.519/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Usulan Penghapusan Sebata-sebut dan dan 2 (dua) Unit BMN Jalan, Ingai dan Jamangan pada Perubuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Provinsi Bali	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
12	Revisi	PPP TELUK BATANG	T.545/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Draft Perijinan Penghapusan Tanah di PPP Teluk Batang Provinsi Kalimantan Barat	1	1	-	1	1	-	-	-	-	TUNTAS
DESEMBER 2025														
13	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.590/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Laporan Pengawasan Penerimaan Tukar Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SKPT Mao	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
14	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.631/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi atas Usulan Tambahan Rincian Output/RO Kegiatan Sector Loan For Integrated Fishing Ports and International Fish Market Phase I Pada Ditem Perikanan Tangkap TA 2025	1	2	-	1	2	-	-	-	-	TUNTAS
15	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.761/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi Usulan Revisi Anggaran penambahan Rincian Output (RO) Khusus Lingkup Ditem Perikanan Tangkap TA 2025 di Prov. DKI Jakarta	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS
16	Revisi	SEKRETARIAT DIPT	T.793/IT/2/NP.380/NU/2025	Hasil Revisi terhadap Usulan Penghapusan BMN yang terdampak rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan di PPN Koyawan melalui PHLN Lender Islamic Development Bank (SIDB)	1	4	-	1	4	-	-	-	-	TUNTAS



Mahrus



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mahrus**

Jabatan : Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan



Mahrus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Pengelolaan Kenelayanan yang Berdaya Saing	1	Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya (persen)	100
		2	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	2500
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya (lokasi)	250
		4	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
2	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Berdaya Saing	5	Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	50
		6	Jumlah Kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya (lembaga)	10
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	84,5
		8	Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88,2
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	86
		10	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	98,6

Data Anggaran :

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	5.147.980.037.000,-
Total Anggaran Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tahun 2026		5.147.980.037.000,-

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Direktur Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan


Mahrus

